



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Infrastruktur Teknologi Informasi sebagai Penunjang Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Analysis of Information Technology Infrastructure as a Support for Immigration Services at the Class I TPI Palembang Immigration Office

Fenny Purwani¹, Santriyan MY^{2*}, Emilia³, Elda Fitriani⁴, Sundari Melisa⁵

¹Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, fennypurwani_uin@radenfatah.ac.id

²Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2210803004@radenfatah.ac.id

³Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2220803029@radenfatah.ac.id

⁴Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2220803021@radenfatah.ac.id

⁵Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020803026@radenfatah.ac.id

*Corresponding Author: 2210803004@radenfatah.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 Apr

Revised: 22 Apr

Accepted: 20 May

Kata Kunci:

Infrastruktur Teknologi
Informasi, Layanan
Keimigrasian, Keamanan
Data

Keywords:

Information Technology
Infrastructure, Immigration
Services, Data Security

Doi: [10.56338/jks.v8i5.7602](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7602)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis infrastruktur teknologi informasi (TI) yang diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai penunjang layanan keimigrasian. Infrastruktur TI yang digunakan mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem jaringan yang mendukung layanan administrasi keimigrasian seperti pengurusan paspor dan pengawasan terhadap orang asing. Dalam penelitian ini juga dibahas tantangan keamanan sistem informasi, seperti kebocoran data pribadi, manipulasi data, dan serangan siber yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi layanan keimigrasian, namun penguatan aspek keamanan sistem sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional dan perlindungan data pribadi masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the information technology (IT) infrastructure implemented at the Immigration Office Class I TPI Palembang as a supporting tool for immigration services. The IT infrastructure includes hardware, software, and network systems that support administrative services such as passport processing and monitoring of foreign nationals. This research also discusses the challenges of information security, such as data breaches, data manipulation, and cyberattacks, which can affect the quality of services. The findings of this study indicate that the implementation of information technology has improved the efficiency of immigration services, but strengthening the security aspects of the system is essential to ensure smooth operations and the protection of citizens' personal data.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa fokus utama pemerintah pusat terletak pada aspek pelayanan, terutama dalam hal penyediaan layanan publik dan produksi barang yang bersifat publik. Menurut (Suriata, 2020), dalam konteks pelayanan publik, tugas pemerintah tidak hanya terbatas pada pembuatan serta pengembangan regulasi, sistem, dan institusi pelayanan, tetapi juga mencakup penciptaan kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang memadai dan berkualitas kepada warganya. Kualitas layanan yang tinggi mencerminkan kemampuan negara dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Standar mutu pelayanan menjadi indikator sejauh mana layanan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kinerja individu dalam organisasi terkait (Simatupang & Nurbaiti, 2023).

Kantor Imigrasi Palembang didirikan pada tahun 1951 dengan nama Kantor Imigrasi Daerah (KIMDA). Statusnya berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981. Awalnya berlokasi di Jl. Mayor Memet Sastrawirya, Boom Baru, kantor ini berpindah ke Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring pada tahun 2005. Berdasarkan Permenkumham Nomor M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009, wilayah kerjanya mencakup dua Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yaitu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan Pelabuhan Boom Baru. Kantor ini berperan penting dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah Sumatera Selatan. Pelayanan paspor bagi warga negara Indonesia merupakan bagian dari layanan keimigrasian. Kantor Imigrasi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia demi memenuhi tanggung jawab pelayanan keimigrasian. (Simatupang & Nurbaiti, 2023).

Dengan demikian, pelayanan menjadi salah satu fungsi utama Kantor Imigrasi yang berperan penting dalam memastikan kelancaran arus lalu lintas manusia, baik yang masuk maupun keluar dari wilayah negara. Dengan kata lain, Kantor Imigrasi berfungsi sebagai salah satu pintu gerbang utama pergerakan manusia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat sangat pentingnya peran Kantor Imigrasi (Waruwu, 2016). Untuk itu melalui inovasi, kreativitas dalam pemikiran dengan pendekatan prinsip e-government yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, Ditjenim melakukan pengembangan dalam pelayanan pengajuan permohonan paspor melalui penerapan Aplikasi M Paspor. Penggunaan aplikasi ini dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa perangkat lunak/aplikasi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan permohonan paspor (Nurwahidah H. Taher, Srilian Laxmiwati Dai, 2024)

Untuk mewujudkan inovasi tersebut, Ditjenim mempercepat layanan digitalisasi paspor melalui M-Paspor yang merupakan pembaharuan Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO). M-Paspor memungkinkan permohonan paspor online dengan pengunggahan scanberkas tanpa batas wilayah dan waktu (mendeley ternate).

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan inovasi pelayanan publik di Indonesia, khususnya dalam sektor keimigrasian. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengadopsi model serupa guna meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi layanan publik yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)

Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) merupakan landasan utama yang mendukung kapabilitas TI dalam membangun aplikasi-aplikasi bisnis, yang kemudian dikelola oleh departemen sistem informasi. Infrastruktur TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta berbagai layanan yang tersedia di dalam organisasi. Perangkat lunak sendiri terdiri dari kumpulan program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu di komputer. Salah satu contoh perangkat lunak dalam infrastruktur TI adalah sistem operasi. Perangkat keras merupakan alat fisik yang digunakan untuk memasukkan, mengumpulkan, memproses, menyimpan data dalam bentuk informasi. Contohnya adalah server (Selvi, 2024).

Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) merupakan kumpulan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan landasan bagi pengembangan sistem informasi perusahaan secara keseluruhan. Infrastruktur ini mencakup investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta layanan-layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan, yang dapat diterapkan di seluruh perusahaan atau tersebar di masing-masing unit bisnis. Infrastruktur TI terdiri dari perangkat serta aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan sebuah perusahaan besar secara terintegrasi. Selain itu, infrastruktur TI juga mencakup layanan lintas perusahaan yang dirancang dan dikelola oleh manajemen, termasuk kapabilitas teknis dan kapabilitas sumber daya manusia. Layanan-layanan ini mendukung aktivitas pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta menjadi refleksi langsung dari efektivitas infrastruktur TI perusahaan. Secara ideal, infrastruktur tersebut harus mampu menunjang kebutuhan bisnis dan strategi sistem informasi organisasi. Kemunculan teknologi baru memiliki pengaruh signifikan terhadap bisnis dan strategi TI perusahaan, serupa dengan dampaknya terhadap layanan yang diberikan kepada pelanggan (Yuliana, 2021).

Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan kualitas layanan.

Pelayanan public dari (8.+Desi+Juli+324-363, n.d.) dapat didefinisikan sebagai segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintahan Kota Lhokseumawe kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum. Pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Keamanan sistem informasi pada layanan imigras

Menurut (Moh. Elang Virgiawan & Yuniar Istiyani, 2024).Keamanan sistem informasi pada layanan imigras adalah suatu kondisi di mana data dan informasi pribadi pemohon, seperti identitas, Kantordokumen pendukung, dan data biometrik yang dikumpulkan selama proses pembuatan paspor, dilindungi dari ancaman penyalahgunaan, kebocoran, manipulasi, atau akses ilegal. Keamanan ini dijalankan melalui penerapan prosedur pelayanan yang menjamin kerahasiaan dan integritas data pemohon.

Dalam layanan imigrasi, keamanan informasi tidak hanya mencakup aspek teknis seperti sistem komputer dan jaringan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab pegawai dalam menjaga informasi

pribadi masyarakat. Misalnya, seperti yang disebutkan dalam wawancara di dokumen, petugas imigrasi wajib menjaga data pemohon agar tidak bocor ke publik dan harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan instansi pemerintah melindungi data warga negaranya.

Keamanan sistem informasi pada layanan imigras

Menurut (Moh. Elang Virgiawan & Yuniar Istiyani, 2024).Keamanan sistem informasi pada layanan imigras adalah suatu kondisi di mana data dan informasi pribadi pemohon, seperti identitas, Kantordokumen pendukung, dan data biometrik yang dikumpulkan selama proses pembuatan paspor, dilindungi dari ancaman penyalahgunaan, kebocoran, manipulasi, atau akses ilegal. Keamanan ini dijalankan melalui penerapan prosedur pelayanan yang menjamin kerahasiaan dan integritas data pemohon.

Dalam layanan imigrasi, keamanan informasi tidak hanya mencakup aspek teknis seperti sistem komputer dan jaringan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab pegawai dalam menjaga informasi pribadi masyarakat. Misalnya, seperti yang disebutkan dalam wawancara di dokumen, petugas imigrasi wajib menjaga data pemohon agar tidak bocor ke publik dan harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan instansi pemerintah melindungi data warga negaranya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Literature review digunakan sebagai pendekatan kualitatif untuk mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik infrastruktur teknologi informasi (TI) di instansi pemerintah, khususnya di Kantor Imigrasi TPI Kelas I Palembang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber ilmiah guna memahami konsep, implementasi, serta pengaruh infrastruktur TI dalam mendukung layanan keimigrasian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar dalam menganalisis kesiapan serta efektivitas infrastruktur TI di Kantor Imigrasi TPI Kelas I Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Infrastruktur Teknologi Informasi sebagai Fondasi Layanan Keimigrasian

Berdasarkan hasil telaah literatur, infrastruktur teknologi informasi (TI) memegang peran fundamental dalam menunjang layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Infrastruktur TI yang digunakan mencakup perangkat keras seperti server, komputer layanan, perangkat biometrik (kamera, sidik jari), serta jaringan komunikasi data yang stabil. Selain itu, sistem perangkat lunak seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), Aplikasi M-Paspor, dan Border Control Management (BCM) menjadi tulang punggung digitalisasi layanan imigrasi.

Transformasi layanan keimigrasian yang berbasis teknologi, seperti implementasi M-Paspor, menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi tidak hanya mengadopsi prinsip e-government, namun juga berupaya memenuhi tuntutan pelayanan publik yang efektif, cepat, dan transparan(Rifqi Al-Halim et al., 2025).

Berdasarkan penelitian (*Admin,+JURNAL+ FARISA+RAMADHANI*, n.d.) Dalam aspek perangkat lunak, aplikasi layanan keimigrasian seperti M-Paspor, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan Border Control Management (BCM) telah diimplementasikan untuk mendukung digitalisasi pelayanan. Aplikasi ini mempercepat alur pelayanan, dari pendaftaran antrian, verifikasi data biometrik, hingga pelaporan real-time kepada instansi pusat. Kemudian, dukungan jaringan yang stabil dan aman menjadi keharusan dalam pengoperasian layanan online.

Penerapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Kualitas pelayanan publik merupakan kemampuan organisasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik melalui pelayanan teknis maupun administrasi (Bambang Suprianto, 2023)

Implementasi layanan berbasis teknologi, seperti Aplikasi M-Paspor, merupakan bentuk inovasi dalam pelayanan publik di sektor keimigrasian. Menurut Padil dan Prasetijowati (2023)(Fajri et al., 2023), Aplikasi M-Paspor memungkinkan pemohon paspor untuk mengunggah dokumen secara daring, memilih jadwal wawancara, serta memantau status permohonan mereka tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi. Penerapan ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

Selain itu, seperti yang diungkapkan Halimah (2024), penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik mampu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, meminimalisir praktik penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah melalui peningkatan transparansi layanan (Prakoso, 2022).

Tantangan Keamanan Sistem Informasi

Menurut (Vidyawati & Rochmiatun, 2021)ada beberapa tantangan keamanan sistem informasi di kantor imigrasi kelas I TPI Palembang.

- **Kebocoran Data Pribadi**

Kebocoran data pribadi merupakan salah satu ancaman serius dalam sistem informasi keimigrasian. Data pribadi pemohon paspor dan izin tinggal, seperti nama, alamat, dan nomor identitas, dapat jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang, yang berpotensi disalahgunakan untuk tindakan penipuan atau pencurian identitas. Penyebab kebocoran ini bisa berupa kelalaian dalam pengelolaan data oleh pegawai atau serangan dari pihak luar yang berhasil mengeksploitasi celah dalam sistem. Untuk meminimalkan risiko kebocoran data, penerapan enkripsi yang kuat dan kontrol akses yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif tersebut.

- **Manipulasi Data**

Manipulasi data mengacu pada perubahan, penghapusan, atau penambahan informasi yang terjadi secara tidak sah dalam sistem. Dalam konteks layanan keimigrasian, manipulasi data dapat mengubah status permohonan paspor atau izin tinggal, yang dapat merugikan pemohon dan mengganggu kelancaran proses layanan. Faktor penyebabnya bisa berupa kurangnya kontrol terhadap akses data atau penyalahgunaan hak akses oleh pegawai yang memiliki wewenang. Untuk mencegah manipulasi data, penting untuk menetapkan kebijakan

kontrol akses yang ketat, serta menerapkan sistem audit yang dapat melacak setiap perubahan yang terjadi pada data, sehingga setiap tindakan yang tidak sah dapat terdeteksi dengan mudah.

- **Serangan Siber**

Serangan siber menjadi salah satu ancaman yang semakin meningkat terhadap sistem informasi keimigrasian. Serangan ini dapat berupa upaya peretasan, penyebaran virus atau malware, serta teknik penipuan seperti phishing yang bertujuan untuk mencuri data atau merusak sistem. Dampak dari serangan siber ini sangat merugikan, mulai dari hilangnya data penting hingga gangguan pada kelancaran operasional layanan publik. Untuk menghadapinya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang perlu memperkuat sistem keamanan dengan menggunakan firewall, perangkat lunak antivirus, serta teknik pemantauan dan deteksi ancaman yang efektif. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai mengenai potensi ancaman, khususnya serangan phishing, menjadi kunci untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi risiko terjadinya serangan.

Efektivitas Sistem Informasi Layanan Keimigrasian

Dalam upaya meningkatkan pelayanan keimigrasian, berbagai kantor imigrasi di Indonesia telah mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi. Studi oleh Atteng dkk. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi E-Passport di Kantor Imigrasi telah meningkatkan efektivitas pelayanan melalui prosedur yang sederhana, biaya yang sesuai, waktu yang cepat, responsivitas pegawai, serta sarana dan prasarana yang memadai (Atteng et al., 2022)

Sementara itu, penelitian lain oleh Faramita dkk. (ELA RIANA FARAMITA, TRI MARDALENA, 2021) di Kantor Imigrasi, mengkaji efektivitas pelayanan pembuatan paspor menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Hasilnya menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 75,74%, yang masuk kategori baik, dengan dimensi produktivitas, efisiensi, adaptasi, pengembangan, dan kepuasan pengguna. Secara umum, hasil studi literatur menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keimigrasian mampu meningkatkan kecepatan layanan, transparansi informasi, serta memperbaiki tingkat kepuasan masyarakat. Namun demikian, beberapa kendala masih ditemukan, seperti gangguan jaringan dan perlunya peningkatan sosialisasi penggunaan aplikasi layanan. dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem informasi layanan keimigrasian tergantung pada kejelasan prosedur, efisiensi waktu dan biaya, responsivitas pegawai, serta kualitas sarana prasarana pendukung layanan.

KESIMPULAN

Penggunaan infrastruktur teknologi informasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas layanan keimigrasian, seperti pembuatan paspor dan pengawasan terhadap orang asing. Sistem informasi yang diterapkan, seperti Aplikasi M-Paspor dan SIMKIM, mempermudah proses administrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Namun, tantangan terkait dengan keamanan data, seperti kebocoran informasi pribadi, manipulasi data, dan serangan siber, masih menjadi perhatian yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah pengamanan data yang ketat dan pelatihan terhadap pegawai sangat diperlukan. Secara keseluruhan, meskipun teknologi informasi telah membawa kemajuan dalam pelayanan, fokus pada penguatan sistem keamanan tetap diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan layanan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- 8.+Desi+Julianti+324-363. (n.d.).
 admin,+JURNAL+FARISA+RAMADHANI. (n.d.).
- Atteng, B. D. G., Waworundeng, W., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi E-Passport Di Kantor Imigrasi Kelas I Manado. *Jurnal Governance*, 2(2), 1–23.
- Bambang Suprianto. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 123–128. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.3015>
- ELA RIANA FARAMITA, TRI MARDALENA, N. D. A. (2021). *EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN*. 5(1), 21–26.
- Fajri, M. F. N., Widhiningsih, V., & Jannah, R. N. (2023). Implementasi aplikasi m-paspor dalam kemudahan pelayanan permohonan paspor dikantor imigrasi kelas i tpi tanjung perak. *Journal of Administration and Internal Development*, 3(2), 49–81.
- Kantor, P. (2024). *Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Tpi) Soekarno-Hatta Dalam Rangka Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Nurafifa*. 1(4), 1579–1589. <https://doi.org/10.25105/kgvc2604>
- Moh. Elang Virgiawan, & Yuniar Istiyani. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pemalang, Jawa Tengah. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 281–297. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.560>
- Nurwahidah H. Taher, Srilian Laxmiwaty Dai, M. M. (2024). *Penggunaan M-Paspor Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate*. 2(2), 175–190.
- Prakoso, L. Y. (2022). Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. *Seminar Nasional Universitas Negeri Gorontalo*, 1(Universitas Negeri Gorontalo), DOI-10.
- Rifqi Al-Halim, A., Sri Astuti, V., & Candradewi Puspitarini, R. (2025). *EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSES PEMBUATAN PASPOR DI UNIT KANTOR KEIMIGRASIAN (UKK) KOTA PROBOLINGGO* (Vol. 7, Issue 1).
- Selvi, D. (2024). *Katera : Jurnal Sains dan Teknologi Strategi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi di PT Samudra Menyelaraskan Kapasitas Layanan dengan Kebutuhan PerencanaanDwi elvi*.
- Simatupang, N., & Nurbaiti. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 326–332.
- Suriata, I. N. (2020). Pengaduan Sengketa dalam Pelayanan Publik dan Penyelesaiannya di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 43–56.
- Vidyawati, S., & Rochmiatun, S. (2021). *PERAN KANTOR IMIGRASI PALEMBANG DALAM MENCEGAH MASUKNYA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM* (Vol. 5, Issue 1).
- Waruwu, H. dan B. M. (2016). Efektivitas Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 43–51.
- Yuliana, R. (2021). *BUKU AJAR INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI*. www.penerbitwidina.com